JURNAL VOKASI INDONESIA
Journal of Vocational Program University of Indonesia
VOLUME 4. NOMOR 2. JULI – DESEMBER 2016

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL : SEBUAH STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KOTA BOGOR

Marsdenia [1]
Mutiha Arthaingan H [2]
[1,2,] Laboratorium Akuntansi dan Audit, Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia,
idelid53@gmail.com cc: idelid@yahoo.com, Ah_mutiha@yahoo.co.id

Diterima : 13 April 2016 **Layak Terbit : 30 Juni 2016**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Komunikasi dan Perangkat Penunjang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Akrual Basis pada Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Bogor . Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data empiris melalui instrumen kuesioner kepada responden yang merupakan SDM yang terlibat secara langsung pada proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah, baik dari Entitas Akuntansi mau pun Entitas Pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan Komitmen Organisasi dan Komunikasi terbukti mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual, tetapi untuk Faktor SDM dan faktor Sarana pendukung tidak mempengaruhi Keberhasilan Implementasi SAP Berbasis akrual.

Kata kunci; Akrual Basis, Laporan Keuangan, PP 71/ 2010, Entitas Sektor Publik

Abstract

This research has objective to examine if factors Commitment to Organization, Human Resourses, Communication and Infrastructure influence the success of implemention of accrual basis in preparing local Government financial statement. This is a quantitative approach research which is used questionnaires to respondent research by using linier regression equation for analysis. The result is, only factors commitment and communication influenced the success of implementation process of accrual basis and factors human resources and infrastructure did not influenced the success of implementation.

Keyword; *Accrual Basis, Financial Statement, PP 71/ 2010, Public Sector Entity*

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara Republik Indonesia dilakukan dalam rangka menegakkan dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sudah dimulai sejak dikeluarkannya paket regulasi berupa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), perbendaharaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004) dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2004). Pemerintah melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan konsisten melalui peningkatan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best*

practices yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia.

Paket UU tersebut telah mengamanahkan pemerintah untuk menerapkan akrual basis akuntansi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU tersebut disahkan, yang artinya adalah pada tahun 2008. Kenyataannya mundur 2 (dua) tahun, dimana pada tahun 2010 barulah diterbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP 24 Tahun 2005, PP 71 Tahun 2010 ini mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari 2 (dua) lampiran, lampiran 1 mengatur SAP berbasis akrual dan Lampiran 2 mengatur SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual dapat dilakukan secara bertahap, dan paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun 2015 Pemerintahan Pusat mau pun Pemerintahan Daerah.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual juga merupakan salah satu ciri adopsi NPM oleh sektor publik. Mahmudi (2003) dan Paulsson (2006) mengungkapkan Konsep *New Publik Management* (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama.

Pada konteks internasional, beberapa riset menemukan bahwa implementasi akrual basis masih menimbulkan beberapa pertanyaan tentang kegunaan untuk sektor publik akan sama dengan kegunaan akrual basis pada sektor komersil (Bromwich dan Lapsley. 1997: Guthrie. 1998: Monsen. 2002). Ada juga hasil riset mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa basis akrual lebih superior dibandingkan basis kas untuk entitas sektor publik (Mellet, 1997: Barton, 1999), peneliti ini berpendapat bahwa implementasi teknik akuntansi pada sektor komersil bukan hanya tidak sesuai tetapi juga akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan fundamental antara sektor komersil dengan sektor publik yang tidak bisa kita hindari, misalkan terkait dengan tujuan (*goal*) dan sistem alokasi yang berbeda diantara kedua sektor/entitas tersebut (Barton, 1999). Sementara itu ada juga peneliti yang mempertanyakan kelayakan implementasi basis akrual ini pada sektor publik (Lapsley. 1986: Pallot. 1992: Mellet. 1997), misalkan saat harus mencadangkan dana yang digunakan untuk membiayai proses identifikasi dan valuasi aset.

Mardiasmo (2009:20) berpendapat berbeda dengan hasil riset dalam konteks internasional tersebut, dimana Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan regulasi yang kemudian dikeluarkan untuk mendukung agenda tersebut. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) juga telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010. Selanjutnya untuk

tingkat pemerintah daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Perubahan basis akuntansi ini bukanlah regulasi yang mudah untuk dilaksanakan, karena agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya riset tentang faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut. Damuharti (2011) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing saling berhubungan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menduduki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan "akuntansi berbasis akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten."

Faktor komitmen dari aparatur pemerintah. Komitmen dalam implementasi SAP merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Budiarto, 2011). Menurut Robbins (2003:92), komitmen pada organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut.

Faktor lain yang juga diduga medukung tercapainya penerapan SAP berbasis akrual adalah ketersediaan sarana pendukung. Kompleksitas dari sistem pencatatan Akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010) dan tingginya volume transaksi ekonomi di daerah maka sangat diperlukan ketersediaan sarana pendukung yang memadai, baik itu berupa *hardware* maupun *software* dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya (Azhar, 2007 dan Budiarto, 2011).

Faktor terakhir adalah diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan baik. Ardiansyah (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota Bogor, maka diperlukan pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual tersebut.

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Wahyuni (2014) dimana

peneliti menemukan faktor SDM tidak berpengaruh atas tercapainya implementasi SAP basis akrual dan ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian Indriani (2013) dan Simanjuntak (2010), lalu Ardiansyah (2013), yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2005 tentang SAP berbasis akrual pada KPPN Malang dan menyimpulkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan komunikasi, sementara komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen masih kurang dari 50%, dimana hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Disamping itu, dengan segala keragaman yang ada di daerah penerapan SAP berbasis akrual tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat.

Peneliti lain yang mencoba menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan pendekatan kualitatif diantaranya Kusuma (2013) yang meneliti kesiapan pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Jember. Indriani (2013), menganalisis kesiapan pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bima. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Hal ini karena permasalahan dan kekurangan masing-masing daerah yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah faktor komitmen organisasi dapat mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor?, (2) Apakah faktor SDM mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor?, dan (3) Apakah faktor komunikasi mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor?, dan (4) Apakah faktor perangkat pendukung mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui faktor komitmen organisasi dapat mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintahan Kota Bogor, (2) Untuk mengetahui faktor SDM dapat mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor, (3) Untuk mengetahui faktor komunikasi dapat mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor, dan (4) Untuk mengetahui faktor perangkat pendukung dapat mempengaruhi tercapainya penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bogor.

METODE

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

Hubungan Komitmen Organisasi dengan tercapainya Penerapan SAP Berbasis Akrual

Akuntansi yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban telah mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan basis akrual yang merupakan adopsi dari sektor swasta menggantikan basis kas. Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual merupakan salah satu ciri adopsi NPM oleh sektor publik. Mahmudi (2003) mengungkapkan Konsep *New Publik Management* (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor public, konsep ini sejalan dengan studi literatur yang dilakukan oleh Wardhaningrum, et.al (2014)

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerjasama dari berbagai pihak. Damuharti (2011) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh banyak variabel atau faktor.

Komitmen dalam implementasi SAP merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Budiarto, 2011). Menurut Robbins (2003:92), komitmen pada organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut.

Hasil penelitian Aritonang (2009) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005. Hasil penelitian Budiarto (2011) juga menemukan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

H1: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Hubungan SDM dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual.

Upping dan Oliver (2008) mengungkapkan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya NPM, dimana akuntansi berbasis akrual merupakan konsep turunan dari NPM karena akuntansi berbasis akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor swasta yang diadopsi sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja.

Sumber daya manusia (SDM) menduduki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP (Indriani, 2013). Simanjuntak (2010) mengungkapkan akuntansi berbasis akrual mampunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas asset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas

dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013), menemukan bahwa terdapat hubungan antara kualitas sumberdaya manusia dengan kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Budiarto (2011).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah :

H2 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap tercapainya penerapan SAP berbasis akrual

Hubungan Komunikasi dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah provinsi NTB sebagai salah satu organisasi publik akan menghadapi kebutuhan untuk menerapkan perubahan, baik strategi, struktur, proses, dan budaya. Perubahan membutuhkan kesiapan, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan dipengaruhi dan didukung oleh berbagai faktor. Hal tersebut dikarenakan pentingnya keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, maka diperlukan pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat mendukung kesiapan penerapan SAP berbasis akrual tersebut.

Komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Sebagaimana layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan baik.

Barnard (1938) dalam Ardiansyah (2013) meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi. Barnard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Warsino (2009). Ia berhasil membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

Penelitian Ardiansyah (2013) menemukan hubungan antara komunikasi dengan kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 : Komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Hubungan Perangkat Pendukung dengan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual.

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer (hardware), software dan lain-lain. Menurut Kenneth dan Jane (2005) dalam Budiarto (2011) "perangkat keras adalah perlengkapan untuk aktivitas input, proses dan output dalam sebuah sistem akuntansi". Sedangkan perangkat lunak menurut Kenneth dan Jane adalah sekumpulan rincian instruksi praprogram yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perangkat keras komponen di dalam sebuah sistem informasi. Peran faktor perangkat pendukung dalam menunjang kesiapan penerapan SAP berbasis akrual berupa teknologi informasi berperan dalam upaya Pemerintah untuk menyajikan Laporan Keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian Budiarto (2011) mengungkapkan bahwa faktor perangkat pendukung berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perangkat pendukung merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini perubahan Basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual penuh. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H4 : Perangkat pendukung berpengaruh terhadap tercapainya penerapan SAP berbasis akrual

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mampunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Bogor.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: (Tabel 1)

1. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
2. Pejabat yang terlibat langsung dalam menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor, yaitu Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Sub Bagian Akuntansi I, Kepala Sub Bagian Akuntansi II, dan Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah.

Pegawai/staf yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Pengelola Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bogor-BPKAD dan Dispenda Kota Bogor @ 20 orang x 2	40
2	Ada 36 SKPD @ 3 SDM yang terkait dengan pengelolaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Satker/Dinas	108
	Sampel/Responden	148

Sumber : BPKAD Pemkot Bogor, diolah

Pada tabel 1 terlihat bahwa populasi penelitian adalah semua SDM Pemerintahan Kota Bogor yang terkait dengan pengelolaan keuangan sebanyak 1200 orang. Lalu dikeluarkan SDM keuangan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sebanyak 1097 orang, sehingga jumlah responden penelitian adalah sebanyak 117 responden.

Dari jumlah sampel sebanyak 117 kuesioner, hanya 57 kuesioner yang kembali, sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 49% (57/117 x 100%).

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang telah diklasifikasikan perlu diberikan definisi secara operasional untuk menjelaskan arah penelitian :

1. Komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Robbins, 2009:92). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah keinginan dari setiap satuan kerja dan pegawai yang bertugas sebagai staf yang menjalankan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan pada setiap satuan kerja dan unit pelayanan untuk melakukan perubahan sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan, dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju). Instrumen dalam penelitian ini adalah lima buah pernyataan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Azhar (2007) dan Budiarto (2011). Indikator yang diukur untuk menilai komitmen organisasi adalah komitmen aparatur yang menjalankan fungsi akuntansi untuk melakukan perubahan dan membuat perubahan tersebut berhasil.

2. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya yang dimiliki organisasi yaitu pegawai yang melaksanakan tugas fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, indikator kualitas yang digunakan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten yang dilihat dari latar belakang pendidikan, pemahaman pekerjaan, penerimaan perubahan, dan pemahaman terhadap peraturan (Ardiansyah, 2013). Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan, dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1

(STS=sangat tidak setuju). Instrumen dalam penelitian ini adalah lima buah pernyataan yang merupakan modifikasi dari instrumen yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Azhar (2007) dan Warisno (2009) dan Wahyuni (2014).

3. Komunikasi didefinisikan sebagai proses yang di dalamnya terdapat perpindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus (Herbert, 1981 dalam Warisno, 2009). Variabel dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan yang diukur menggunakan skala *likert* dengan skor jawaban 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dimana skor 1 menunjukkan kriteria sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan kriteria sangat setuju. Instrumen dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2008) dan Wahyuni (2014)

4. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksannya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer baik *hardware* maupun *software* dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya menurut persepsi pengelola keuangan yang memanfaatkan perangkat pendukung tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan. Instrumen dalam variabel ini diadopsi dari penelitian Azhar (2007) dan Budiarto (2011) dan Wahyuni (2014)

Tercapainya penerapan SAP berbasis akrual ditinjau dari persepsi responden tentang kesiapan responden dan instansi tempat responden bekerja dalam menerapkan SAP berbasis akrual, visi dan misi dari instansi dalam melakukan penerapan SAP berbasis akrual dan bagaimana perubahan itu dapat tercapai, serta dukungan yang diberikan oleh instansi. Instrumen dalam variabel ini diadopsi pertanyaan penelitian Asriani (2009) dalam Wahyuni (2014) yang menganalisis kesiapan pegawai menerima perubahan untuk penerapan *Balance Scorecard* di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengenai persepsi pegawai tentang kesiapan dan dukungan pihak organisasi dalam mengelola perubahan dan disesuaikan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas).

Dalam analisis regresi linear berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut (Ghozali, 2006:82). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y=\alpha+\beta1K+\beta2SDM+\beta3KOM+\beta4PP+e$$

Dengan penjelasan sebagai berikut,

Y = Keberhasilan implementasi SAP Berbasis Akrual

α = Konstanta

$\beta1$ $\beta2$ $\beta3$ $\beta4$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel Bebas

K = Komitmen Organisasi
SDM = Kualitas Sumber Daya Manusia
KOM = Komunikasi
PP = Perangkat Pendukung
e = Error Term

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Ketentuan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Sementara, untuk Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mampunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Sebelum melakukan pengolahan data hasil survey, dilakukan terlebih dahulu uji validitas data dengan menggunakan 30 sampel hasil kuesioner. Hasil analisis realibilitas menggunakan teknik *alpha cronbach* diperoleh nilai koefisien realibilitas sebesar 0.771 > r tabel (dengan n=30 dan *alpha* 5%) yaitu 0.361. Nilai realibilitas instrumen sebesar 0.771 menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya. Sehingga bisa dilanjutkan dengan memakai keseluruhan dari kuesioner yang sudah diiisi yaitu sebanyak 57 kuesioner.

Hasil Uji t

Tabel 2 : Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
α	13.629	6.122		2.226	.030	1.344	25.914
β_1	.512	.139	.396	3.694	.001	.234	.790
β_2	-.023	.086	-.030	-.271	.787	-.197	.150
β_3	.676	.207	.392	3.266	.002	.261	1.092
β_4	.405	.208	.240	1.948	.057	-.012	.821

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

a. *Dependent Variable*:

Keberhasilan_implementasi_accrual

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dengan menggunakan 57 sampel kuesioner yang kembali, maka diperoleh *output* seperti pada lampiran 2. Berdasarkan hasil output uji t tersebut diperoleh informasi bahwa sebagai berikut: Komitmen, dengan nilai signifikansi (0,001< alpha 0,05, dan *Confidence Interval* berada antara 0,234 sampai 0,790 maka Komitmen berhubungan linier dengan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual (Tolak Ho).

SDM, dengan nilai signifikansi (0,787 > alpha 0,05, dan *Confidence Interval* berada antara -0,197 sampai 0,150 maka SDM tidak berhubungan linier dengan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual (Terima Ho).

Komunikasi dengan nilai signifikansi (0,002< alpha 0,05, dan *Confidence Interval* berada antara 0,261 sampai 1,092 maka Komunikasi berhubungan linier dengan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual (Tolak Ho).

Perangkat Pendukung, dengan nilai signifikansi (0,057 > alpha 0,05, dan *Confidence Interval* berada antara -0,012 sampai 0,821 maka Perangkat Pendukung tidak berhubungan linier dengan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual (Terima Ho).

Hasil Uji F

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), Uji F dilakukan dalam rangka untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dan pengujian untuk regresi berganda (majemuk) dilakukan dengan menggunakan tabel yang disebut dengan tabel ANOVA (*Analysis of Variance*). Untuk penelitian ini pada Lampiran 3, terlihat *output* uji F dengan Nilai signifikansi (0.000) < 0.05 (*alpha*) maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini memberikan makna bahwa faktor-faktor komitmen organisasi, SDM, komunikasi dan sarana pendukung secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual di pemerintahan kota Bogor.

Sedangkan untuk nilai *R Square* sebesar 9,678 bermakna bahwa hanya 46 % variabel dependen (keberhasilan implementasi basis akrual dalam menyusun laporan keuangan Pemerintahan daerah) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (komitmen, SDM, komunikasi dan perangkat pendukung),

sedangkan sisanya sebesar 54% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang belum masuk kedalam model.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan *output software* yang dipakai untuk mengolah data, maka disimpulkan model linear persamaan dari penelitian ini untuk variabel terikat Keberhasilan Implementasi SAP berbasis akrual adalah pada persamaan (2)

= 13.629 + 0.512Komitmen - 0.23SDM + 0.676Komunikasi + 0.405Perangkat pendukung + ε.....(2) (3.2)

Dengan persamaan yang disederhanakan sebagai persamaan (3) berikut:

Y= 13.629+ 0.512K - 0.23 SDM+ 0.676KOM + 0.405PP + e .....(3)

Persamaan (2) dan persamaan (3) tersebut memiliki makna bahwa variasi keberhasilan implementasi laporan keuangan pemerintahan kota Bogor dipengaruhi oleh faktor komitmen terhadap organisasi sebesar 0,15, dan faktor komunikasi sebesar 0,676. Sedangkan faktor SDM dan Sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi *accrual basis* pada laporan keuangan daerah Pemerintahan Kota Bogor.

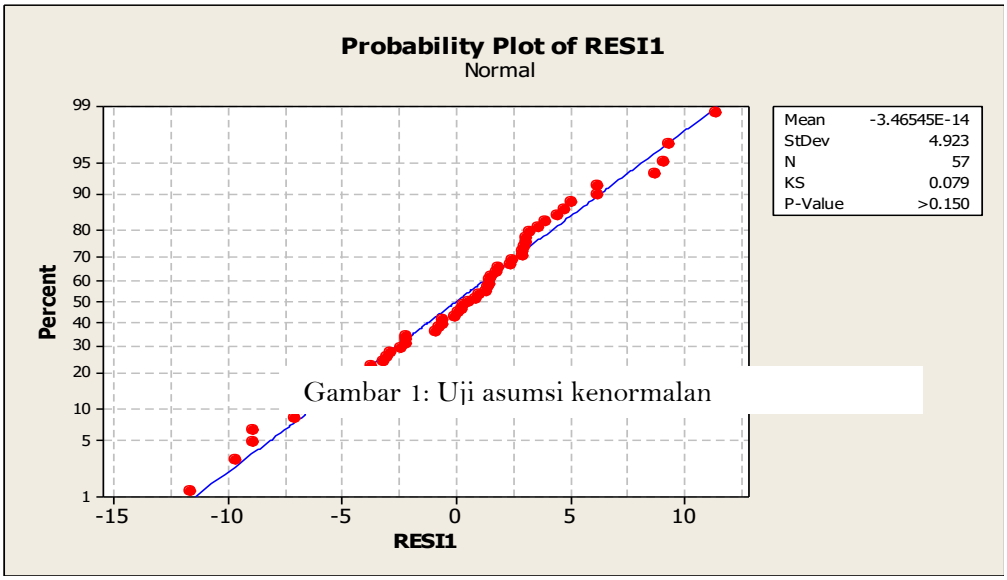

Gambar 1: Uji asumsi kenormalan

Berdasarkan hasil uji kenormalan menggunakan Kolmogorof-Smirnof maka didapat nilai *p-value* > 0.05 (*alpha*)

Sehingga asumsi kenormalan terpenuhi terlihat pada Gambar 1, ini bermakna bahwa data yang diperoleh bisa dilanjutkan untuk diolah dan bebas dari kemungkinan terjadinya kesimpulan yang bias.

Uji Kehomogenan

Pada Gambar 2 terlihat bahwa pola tebaran sisaan memenuhi asumsi MKT (Metode Kuadrat Terkecil). Artinya adalah pola tebaraan sisaan berpusat di NOL, lebar pita sama, tidak berpola (tidak ada sebaran titik-titik yang terkonsentrasi membentuk pola tre sehingga asumsi kehomogenan terpenuhi, yang artinya data yang diperoleh dari *survey* ini bisa dilanjutkan untuk diproses yang tujuan akhirnya adalah untuk bisa menjawab pertanyaan penelitin, memberikan kesimpulan yang tidak bias.

Tabel 3 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678[a]	.460	.418	5.10924

a. Predictors: (Constant), Perangkat_pendukung, SDM, Komitmen, Komunikasi

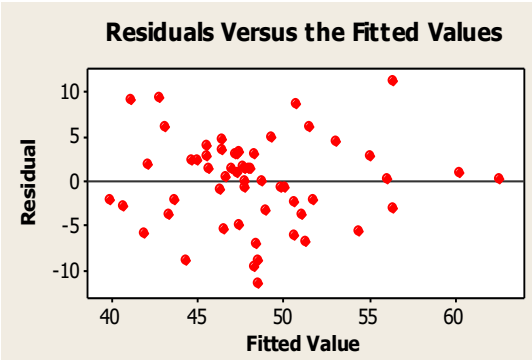

Gambar 2. Uji Kehomogenan

Autokorelasi

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) untuk model regresi dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*), dimana dalam menduga parameter dalam regresi berganda/majemuk, OLS mengasumsikan bahwa *error* merupakan variabel random yang independen (tidak berkorelasi) agar penduga bersifat *BLUE*. Salah satu uji formal yang paling sering dipakai oleh para peneliti untuk mendeteksi adanya otokorelasi pada suatu model regresi adalah uji Durbin-Watson, dimana dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : Ada autokorelasi

Durbin-Watson *statistic* = 1.61199, berdasarkan pada tabel Durbin Watson nilai Watson nilai $\delta u = 1.7253$, sedangkan nilai $\delta w > \delta u$ (1.7253) dan $< 4 - \delta u$ (6.9012), maka tidak ada autokorelasi, sehingga asumsi terpenuhi.

Profil Responden

Statistik desktiptif (tabel 4) menjelaskan secara terinci karakteristik responden yang diasumsikan akan mempengaruhi ketajaman analisis statistik inferensial (pengujian hipotesis). Statistik deskriptif dijelaskan pada Tabel 4 yang menggambarkan profil responden, diketahui bahwa responden penelitian ini mayoritas terdiri dari laki-laki (56%) dan 44 % terdiri dari wanita, tetapi secara umum bisa disimpulkan tersebar merata baik untuk responden laki-laki mau pun wanita. Ada pun artinya didominasi secara tipis oleh pria dari pada wanita bermakna Pemerintahan Kota Bogor untuk urusan SDM akuntansi dan keuangan relatif lebih aman banyak tenaga

kerja pria dari pada wanita. Seperti kita ketahui sesuai peraturan tenaga kerja, wanita pekerja memiliki dispensasi untuk tidak masuk jika dalam kondisi hamil, melahirkan dan *period leave*.

Responden penelitian ini menurut usia, terdiri dari responden berusia 31-40 tahun dengan besaran hampir separoh dari total responden, yang bermakna bahwa responden didominasi oleh usia produktif, yang artinya pada usia produktif ini diharapkan tenaga kerja lebih mudah untuk menerima setiap perubahan sistem yang terjadi di entitas. Makna lebih lanjut adalah responden usia produktif ini akan lebih bisa untuk ditingkatkan baik pengetahuan mau pun keterampilan yang mendukung keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual.

Lalu jika dilihat dari kepangkatan, terlihat bahwa SDM di dominasi pada jenjang dengan pangkat golongan III sebanyak 65%, yang artinya SDM masih ada kemungkinan untuk promosi kejenjang golongan yang lebih tinggi lagi, yaitu golongan IV. Bermakna bahwa SDM diharapkan memiliki motivasi yang lumayan tinggi untuk terus menunjukkan prestasi, dan selanjutnya akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual.

SDM responden dari aspek pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan Strata 1 (56%), 20% dengan jenjang pendidikan Strata 2 dan hanya 10 % berpendidikan sampai tingkat menengah atas (SLTA). Bermakna bahwa pendidikan SDM lumayan tinggi dengan total 78% dengan pendidikan jenjang minimal Strata 1, dan sisanya adalah SLTA, bermakna bahwa bisa anggaran terbatas akan terbuka peluang dilakukan sosialisasi SAP berbasis akrual basis secar internal narasumber dalam bentuk *inhouse training*.

SDM yang menjadi responden yang tidak pernah ikut bimtek (bimbingan teknis) atau kursus dengan rata-rata 15% , dan sebanyak 20% dari responden telah mengikuti sebanyak satu sampai dengan dua kali ikut bimtek atau kursus dibidang akuntansi. Hal ini bermakna bahwa masih terbuka peluang yang besar utuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM untuk keberhasilan impelementasi SAP berbasis akrual pada saat penyusunan laporan keuangan dawerah Kota Bogor.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bogor pada bulan Desember 2015, diperoleh informasi bahwa pada saat ini sedang intensif dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan berupa bimbingan teknis di Kota Bandung. Hal ini digalakkan terlebih karena pada laporan keuangan periode tahun 2014 Pemerintahan Kota Bogor hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP yang diberikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bermakna bahwa laporan keuangan sudah wajar dan tanpa salah saji material untuk semua akun kecuali akun aset tetap. Akun aset tetap berdasarkan basis kas menuju akrual yang dipakai untuk laporan keuangan sebelum tahun 2015 masih belum berhasil membuat daftar inventarisasi aset

tetap secara komprehensif yang memang menjadi hak milik dari pemerintahan Kota Bogor.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini melakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan data yang dipakai valid sehingga kesimpulan yang diambil pun tidak bias. Sebelum melakukan Statistik inferensial (Pengujian hipotesis) dilakukan dengan uji parsial (uji *t*) simultan (Uji *F)*, selanjutnya hasil perhitungan dari uji regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 17.00 for Windows.* Tabel 4.2 merupakan rangkuman hasil analisis linier berganda yang memperlihatkan hipotesis manakah yang diterima atau ditolak sehingga bisa terbukti secara statistik faktor-faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SAP basis akrual didalam penyusunan laporan keuangan sektor publik pemerintahan Kota Bogor.

Hasil Regresi

Faktor-faktor Komitmen Organisasi, SDM, Komunikasi dan Sarana pendukung hanya bisa menjelaskan variasi keberhasilan implementasi Laporan keuangan daerah berbasis akrual di pemerintahan kota Bogor sebesar 46%. Artinya adalah ada beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap variasi keberhasilan ini sebesar 54%. Berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan *open question* dikuesioner dan wawancara dengan Kepala bidang Akuntansi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bogor, di peroleh beberapa fakta bahwa SDM Akuntansi Pemerintahan Kota Bogor memiliki persepsi bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual, dimana hasil ini konsisten dengan pendapat Shafer (2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Sikap ini dapat ditandai dengan empat hal, yaitu : a) Kepercayaan karyawan terhadap organisasi, b) Partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja, c) Loyalitas terhadap organisasi, d) Adanya Perasaan menjadi bagian dari organisasi.

Hasil penelitian untuk faktor SDM konsisten dengan hasil Wahyuni (2014) dimana peneliti menemukan faktor SDM tidak berpengaruh atas tercapainya implementasi SAP basis akrual dan ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian Indriani (2013) dan Simanjuntak (2010). Ada pun persamaan responden dengan SDM terkait akuntansi mulai dari verifikator bukti transaksi, entri jurnal dan penyusunan laporan keuangan SKPD, Dinas dan Badan. Penelitian Wahyuni juga mengambil sampel pada Laporan Keuangan Daerah, hanya berbeda gegrafis saja, dimana riset ini di Kota Bogor, provinsi Jawa barat, sedangmkan Wahyuni (2014) mengambil lingkup yang lebih luas yaitu Pemerintahan provinsi NTB.

Faktor Komunikasi, berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan daerah berbasis akrual, ini konsisten dengan hasil beberapa penelitian

terdahulu yaitu oleh Barnard (1938) dalam Ardiansyah (2013) serta Warsino (2009), menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu kekuatan untuk bisa suatu entitas menjadi kuat dalam rangka pencapaian visi, misi dan program yang sudah direncanakan.

Kontras hasil dengan penelitian terdahulu (Wahyuni, 2014), pada riset ini ditemukan bahwa SDM memiliki persepsi bahwa sarana pendukung tidak merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan Daerah pemerintah Kota Bogor.

Hasil riset ini juga inkonsisten dengan penlitian Azhar (2007) dan Budiarto (2011) yang memiliki kesimpulan bahwa sara pendukung seperti perengkat teknologi lunak seperti aplikasi dan perangkat teknologi keras seperti fisik dan jaringan komputer tersebut mutlak diperlukan. Hal ini mungkin karena jaringan itu meruakan dropping dari pusat / BPKP, sehingga ada beberapa SDM yang tidak aware bahwa tanpa jaringan yang lengkap pada saat penyusunan akan terasa rumit, dan alasan beberapa SDM, bahwa pada kenyataannya ada beberapa tahap penyusunan jurnal tidak melalui sistem tetapi entry secara manual, seperti restatement, dengan adanya SIMAK BMN (Sistem Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) yang tidak mengakomodir ayat jurnal penyesuaian beberapa transaksi seperti pembebanan penyusutan aset tetap pemerintahan daerah dan kota

Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan/simultan terlihat bahwa Faktor-faktor Komitmen Organisasi, SDM, Komunikasi dan Sarana pendukung hanya bisa menjelaskan variasi keberhasilan implementasi Laporan keuangan daerah berbasis akrual di pemerintahan kota Bogor sebesar 46%. Selanjutna ini bermakna bahwa masih ada beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap variasi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan daerah pemerintahan Kota Bogor ini sebesar 54%. Dan ini akan memberikan kontribusi peneltian untuk penelitian selanjutnya untuk memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku SDM seperti motivasi, insentif, bonus dna sanksi, atau faktor eksternal seperti : menjadikan sebagai gerakan nasional dan bersifat instruksi dari pusat ke daerah.

Hasil pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu, regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 1 ini, konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2009), Wahyuni (2014) yang menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP 71 tahun 2010. Hasil penelitian Budiarto (2011) juga menemukan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP. Berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan *open*

question di kuesioner dan wawancara dengan Kepala bidang Akuntansi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bogor, di peroleh beberapa fakta bahwa SDM Akuntansi Pemerintahan Kota Bogor memiliki persepsi bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual, dimana hasil ini konsisten dengan pendapat Shafer (2002) yang mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi.

Sikap ini dapat ditandai dengan empat hal yaitu:

- Kepercayaan karyawan terhadap organisasi
- Partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja
- Loyalitas terhadap organisasi
- Adanya Perasaan menjadi bagian dari organisasi

Interpretasi Hipotesis 1

Hipotesis 1 diterima, yang artinya adalah Faktor komitmen SDM terhadap organisasi mempengaruhi keberhasilan implementasi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Kota Bogor.

Komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Robbins, 2009:92). Faktor komitmen merupakan faktor internal dari SDM yang secara tidak langsung mempengarui peri laku SDM untuk mau mendukung keberhasilan SAP berbasis akrual.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi atau dampak dari hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa komitmen pada organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan akrual basis pada laporan keuangan Pemerintahan Kota Bogor akan memberikan beberapa implikasi kepada pihak terkait. Implikasi hasil pengujian hipotesis 1 akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Regulator

Regulator dalam hal ini bisa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bisa mengatur supaya komitmen pada setiap SDM yang terkait Akuntansi dan Keuangan bisa memiliki rasa bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari organisasi. Saat ini tujuan pemerintahan Kota bogor adalah kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, sehingga regulator menjalankan fungsinya bisa memfokuskan diri untuk melahirkan produk hukum yang akan meningkatan komitmen atau melahirkan komitmen pada pemerintahan Kota Bogor.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan Kota Bogor sebagai entitas pelaporan, sesuai dengan PP 71 2010,

membuat peraturan turunan sejalan dengan peraturan diatasnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara, sehingga regulasi menjadi lebih kuat untuk ranah Pemerintahan Kota, hal ini sangat perlu di era otonomi daerah.

Akademisi

Implikasi dengan diterimanya hipotesis 1 bagi akademisi, akan dibagi akademisi sebagai peneliti, dan sebagai *trainer*. Jika dilihat sebagai peneliti, maka ada peluang membuat riset lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen SDM pada pemerintahan, sehingga bisa berkontribusi fokus pada komitmen SDM untuk pencapaian tujuan keberhasilan laporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan sebagai trainer, perlu ditambah materi selain materi substansi ke materi motivasi yang menimbulkan komitmen pada SDM Pemerintahan Kota dan Kabupaten

Saran/rekomendasi

Hasil pengujian hipotesis 1 yang diterima ini dengan dampak/implikasinya akan menimbulkan peluang kontribusi penelitian berupa rekomendasi/saran untuk pihak-pihak regulator, Pemerintahan Kota Bogor dan Akademisi baik sebagai peneliti mau pun sebagai *trainer*. Saran ini diharapkan bisa diaplikasikan oleh masing-masing pihak sehingga hasil penelitian ini berkontibusi secara nyata.

Regulator

Saran/rekomendasi bagi regulator, membuat suatu aturan bahwa Keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual adalah merupakan untuk kepentingan NKRI dan bisa juga dibuat suatu reward untuk yang berhasil diumumkan secara nasional.Lalu Pemerintahan Kota melanjutkan dengan menerbitkan aturan yang selaras dan harmonis dengan aturan regulator bahwa keberhasilan implementasi adalah untuk kepentingan organisasi pemerintahan Kota Bogor.

Pemerintahan kota Bogor dengan Organisasi Pemerintahan Daerahnya, harus melakukan tindakan yang sama juga dengan pusat, dengan menghidupkan gerakan nasional dari pusat menjadi gerakan daerah yang diharapkan bisa menimbulkan komitmen pada SDM Pemerintahan Kota Bogor akan suksesnya implementasi SAP berbasis akrual.

Akademisi

Saran untuk akademisi sebagai peneliti, melanjutkan riset dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen SDM Pemerintahan Kota bogor terhadap Keberhasilan Penerapan basis akrual pada laporan keuangan daerah Kota bogor. Saran sebagai *trainer* dalam konteks komitmen adalah memasukkan materi aplikasi motivasi SDM dalam mencapai tujuan organisasi, menyampaikan materi dengan cara partisipatif dan ada materi *micro teaching* agar SDM lebih tertarik akan materi yang diberikan. Kegiatan juga bisa bervariasi tidak melulu didalam

ruangan, bisa berupa aktivitas di luar ruangan seperti *outbound* dan *exercise* lainnya.

Hasil pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 dimana SDM Pemerintahan kota Bogor menurut persepsi SDM pemerintahan Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya akan dibahas interpretasi hasil pengujian hipotesis 2, implikasi/dampak hasil pengujian saran/rekomendasi terhadap regulator, pemerintahan kota dan akademisi secra terperinci.

Hasil penelitian untuk faktor SDM konsisten dengan hasil Wahyuni (2014) dimana peneliti menemukan faktor SDM tidak berpengaruh atas tercapainya implementasi SAP basis akrual dan ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian Indriani (2013) dan Simanjuntak (2010).

Ada pun persamaan responden dengan SDM terkait akuntansi mulai dari verifikator bukti transaksi, entri jurnal dan penyusunan laporan keuangan SKPD, Dinas dan Badan. Penelitian Wahyuni juga mengambil sampel pada Laporan Keuangan Daerah, hanya berbeda geografis saja, dimana riset ini di Kota Bogor, provinsi Jawa barat, sedangmkan Wahyuni (2014) mengambil lingkup yang lebih luas yaitu Pemerintahan provinsi NTB.

Interpretasi Hipotesis 2

Hipotesis 2 ditolak, Interpretasinya adalah siapa pun SDM dan kompetensi apa pun yang dimiliki maka keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan tetap tercapai. Hipotesis 1 diterima, yang artinya adalah Faktor komitmen SDM terhadap organisasi mempengaruhi keberhasilan implementasi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Kota Bogor.

Walau pun di tolak hipotesisnya ada fenomena untuk SDM didaerah yang tidak bisa kita pungkiri yaitu berdasarkan data hanya 50% yang memang *background* terkait akuntansi, sedangkan yang lain ada yang manajemen, bahasa dan hukum. Informasi/Data menurut Kabid Akuntansi Pemkot Bogor, Wawancara tgl 4 Desember 2015)

Berdasarkan *profile* responden terlihat bahwa pelatihan/bimbingan teknis yang diterima oleh SDM yang menjadi responden mayoritas hanya 1 sd 2 kali saja, padahal mayoritas tidak memiliki latar belakang akuntansi. Adanya kekurangsinambungan antara pelatihan dengan penempatan (Berdasarkan wawancara dengan kabid akuntansi, sering terjadi mutasi bagi SDM ke bagian yang tidak ada akuntansi sesaat setelah mendapatkan *training* akuntansi.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi atau dampak dari hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa SDM pada organisasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan akrual basis pada laporan keuangan Pemerintahan Kota Bogor akan memberikan beberapa implikasi kepada pihak terkait. Implikasi hasil pengujian hipotesis 2 akan secara terperinci dibahas dari

interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu, regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Regulator

Regulator dalam hal ini bisa Kementerian dalam Negeri, kementerian Keuangan dan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bisa mengatur SDM yang terkait Akuntansi dan Keuangan bisa memiliki rasa bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari organisasi. Pemerintah harus memberikan perhatian atas masalah SDM yang tidak *right person in the right place*. Sudah saatnya Kemen PAN melakukan *mapping* kompetensi SDM di pemerintahan daerah sehingga diketahui berapa kebutuhan akuntan dalam rangka mendukung impementasi SA berbasis akrual.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan Kota Bogor diharapkan melakukan tindakan antisipatif juga jika ada SDM yang tidak memiliki latarbelakang yang tidak sesuai dengan penempatannya di organisasi pemerintahan yang dipimpin, maka bisa melakukan pengajuan mutasi kepada KemenPAN, dan juga bisa mengajukan penolakan jika ternya SDM yang baru selesai training akuntansi, tetapi malah di mutasi kebagian yang tidak ada sangkut pautnya dengan akuntansi. Sebaliknya, harus berani menolak SDM yang dimutasi ke bagian akuntansi tanpa memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan.

Akademisi

Bagi Akademisi sebagai peneliti perlu mengkaji ulang instrumen penelitian untuk SDM, sehingga diperoleh jawaban responden yang sebenarnya, jadi untuk 1 tujuan dengan membuat bebrapa pertanyaan sehingga jawaban SDM bisa di *crosscheck* dengan beberapa pertanyaan. Sebagai *trainer*, perlu ekstra lebih untuk melatih yang bukan latarbelakang akuntansi

Saran/rekomendasi

Implikasi/dampak Hasil pengujian hipotesis 2 yang ditolak ini, yaitu yang bermakna SDM PemKot Bogor tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu: regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Regulator

Bagi Regulator, yang menangani SDM, membuat peta SDM seluruh Pemda/Pemkot, dengan memprioritaskan penempatan/mutasi SDM sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh SDM tersebut. Harus berkomitmen dan konsisten dalam melakukan pengelolaan SDM dengan mengutamakan komptensi dan latar belakang pendidikan dengan uraian jabatan yang akan di emban oleh SDM tersebut.

Pemerintahan Kota Bogor

Saran untuk perintahan Kota Bogor, evaluasi SDM yang ada saat ini, lakukan

penempatan SDM akuntansi sesuai dengan latar belakang dan lakukan pelatihan secara berkesinambungan karena penerapan akrual basis ini memerlukan pelatihan yang terus menerus.

Akademisi

Saran untuk akademisi, sebagai peneliti mungkin bisa membuat riset lanjutan berupa riset eksperimental dan atau fokus ke SDM sebagai satu variabel independen dan keberhasilan impelementasi sebagai variabel dependen. Sedangkan sebagai *trainer*, memberikan umpan balik kepada pemerintahan kota akan tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk melatih SDM dengan dan tnpa latar belakang akuntansi, dan bahkan mungkin kelasnya harus dibuat terpisah, semacam kelas matrikulasi.

Hasil pengujian Hipotesis *3*

Hasil pengujian hipotesis 3 berkesimpulan bahwa diterima, yang bermakna faktor komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Faktor Komunikasi, berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan daerah berbasis akrual, ini konsisten dengan hasil beberapa penelitian terdahulu yaitu oleh Barnard (1938) dalam Ardiansyah (2013) serta Warsino (2009), menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu kekuatan untuk bisa suatu entitas menjadi kuat dalam rangka pencapaian visi, misi dan program yang sudah direncanakan.

Perlu di buat aturan-aturan yang konsisten antara pemerintahan pusat ke pemerintahan daerrah walau pun ada semangat otonom. Hal ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PP 71 2010 dan diharapkan tidak ada variasi dari implementasi, supaya bisa dilakukan analisis perbandingan antara pemerintahan kota atau daerah. Konsistensi diharapkan akan menciptakna komunikasi efektif dan efisien antara pihak yang terkait.

Interpretasi Hipotesis *3*

Diterimanya hipotesis 3 yaitu Faktor Komunikasi, berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan daerah berbasis akrual, memiliki interpretasi bahwa komunikasi yang berkesinambungan baik antara pemerintahan pusat dan daerah, mau pun komunikasi antara pimpinan pemerintahan Kota Bogor dengan organisasi pemerintahan dibawahnya baik sekda (Sekretaris Daerah), Eselon 1, 2 dan 3, baik antar Badan, Instansi serta SKPD dan PPKD dalam rangka mensukseskan implementasi laporan keuanga berbasis akrual.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa komunikasi pada organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan akrual basis pada laporan keuangan Pemerintahan Kota Bogor akan memberikan beberapa implikasi kepada pihak terkait.

Implikasi hasil pengujian hipotesis 3 akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Regulator

Regulator dalam hal ini bisa Kementerian dalam Negeri, kementerian Keuangan dan kementerian Pendayagynaan Aparatur Negara, selalu menjaga komunikasi yang berkesinambungan agar setiap kebijakan yang dibuat dilevel atas diterima sama baiknya dengan tujuan/informasi yang akan diberikan oleh pemerintahan pusat.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan Kota Bogor sebagai entitas Pelaporan, sesuai dengan PP 71 2010 senantiasa menjaga komunikasi dengan organ-organ dibawahnya supaya pesan yang disampaikan diterima dan dijalankan dengan baik. Komunikasi ini bisa dalam berbagai bentuk sesuai dengan era *high tech* seperti sosial media, internet, sehingga tidak ada informasi yang ditutup (lebih transparan).

Akademisi

Untuk akademisi sebagai peneliti bisa membuat riset lanjutan bagaimana komunikasi efektif dan efisien bisa tercipta, dengan memperbaiki instrumen penelitian disisi pertanyaa kuesionernya. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan penelitian non linear *Logit Probit*. Sedangkan akademisi sebagai *trainer* bisa memberikan materi yang mempertajam dan meningkatkan komunikasi antar organ-organ di pemerintahan kota Bogor.

Saran/rekomendasi

Hasil pengujian hipotesis 3, bahwa faktor Komunikasi berpengaruh untuk keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, akan secara terperinci dibahas mulai dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Bogor dan Akademisi.

Regulator

Peneliti memberikan saran atas implikasi hasil hipotesis 3, dimana komunikasi efektif bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi. Rekomendasi pemerintahan pusat membuat *help desk* yang terkelola dengan baik dan dibuat per regional dalam rangka komunikasi efektif dan efisien jika ada permasalahan dalam implementasi laporan keuangan yang berbasis akrual ini. Disarankan yang duduk sebagai *officer*nya adalah orang yang paham akuntansi akrual tidak sekedar *officer* sebagai resepsionis atau *call center*.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan kota Bogor disarankan menciptakan komunikasi efektif efisien dari bagian BPKAD dimana yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan. Saran disini sama dengan pemerintahan pusat, ada help desk yang bisa melalui telepon, email atau langsung datang ke entitas akuntansi jika

menghadapi kesulitan dalam jurnal akuntansi akrual. Komunikasi bisa bersifat koordinasi jika selevel dan jika komunikasi kebawah bersifat instruktif, tentu sudah menerima masukan dan saran dari bawahan akan target yang disesuaikan dengan kemampuan.

Akademisi

Para Akademisi yang peneliti bisa direkomendasikan membuat riset terkait faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif efisien dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hasil pengujian hipotesis 3 akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi. Sedangkan akademisi sebagai *trainer* disarankan memasukkan materi komunikasi efektif dan efisien selevel dan dengan bawahan.

Hasil pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4, kontras hasil dengan penelitian terdahulu (Wahyuni, 2014), pada riset ini ditemukan bahwa SDM memiliki persepsi bahwa sarana pendukung tidak merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan Daerah pemerintah Kota Bogor. Hasil riset ini juga inkonsisten dengan penelitian Azhar (2007) dan Budiarto (2011) yang memiliki kesimpulan bahwa sara pendukung seperti perangkat teknologi lunak seperti aplikasi dan perangkat teknologi keras seperti fisik dan jaringan komputer tersebut mutlak diperlukan. Hal ini mungkin karena jaringan itu merupakan *dropping* dari pusat/BPKP, sehingga ada beberapa SDM yang tidak *aware* bahwa tanpa jaringan yang lengkap pada saat penyusunan akan terasa rumit, dan alasan beberapa SDM, bahwa pada kenyataannya ada beberapa tahap penyusunan jurnal tidak melalui sistem tetapi *entry* secara manual, seperti *restatement*, dengan adanya SIMAK BMN (Sistem Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) yang tidak mengakomodir ayat jurnal penyesuaian beberapa transaksi seperti pembebanan penyusutan aset tetap pemerintahan daerah dan Kota.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis 4 akan secara terperinci dibahas dari interpretasi hasil hipotesis, implikasi penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Bogor dan Akademisi. Walau pun sarana penunjang tidak berpengaruh diharapkan tetap bisa memberikan kontribusi untuk penelitian ini.

Interpretasi Hipotesis 4

Hipotesis 4 ditolak, Interpretasinya adalah faktor sarana prasana pendukung menurut persepsi SDM Pemkot Bogor tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan wawancara dan data, diduga salah satu faktor penyebab SDM Pemkot Bogor memiliki persepsi bahwa sarana pendukung tidak mempengaruhi keberhasilan adanya dropping *software* dari BPKP.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari ditolaknya hipotesis 4 ini akan dibahas pada bab selanjutnya baik dari sudut regulator, Pemerintahan Kota Bogor mau pun Akademisis peneliti mau pun trainer. Begitu juga dengan saran/rekomendasi terkait implikasi/dampak hasil riset ini dari sudut regulator, pemerintahan kota bogor mau pun akademisi peneliti mau pun *trainer*.

Regulator

Regulator dalam hal ini bisa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sebaiknya mengatur keseragaman *software* akuntansi yang dipakai, sehingga mengatur agar sarana prasarana terkait penyusunan laporan keuangan supaya agar semua pemkot bisa meng interpretasikan PP 7 1 2010 dengan sama, dan daya banding laporan keuangan bisa ditingkatkan.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan Kota Bogor sebagai entitas Pelaporan, sesuai dengan PP 71 2010 menggunakan sarana prasana *dropping* dari pusat saja, untuk menjamin pemeliharaan penyusunan laporan keuangan daerah pemerintahan kota Bogor sudah sesuai dan seragam dengan Pusat.

Akademisi

Hasil pengujian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, membuat hal ini menjadi *given*. Walau pun begitu diharapkan akademisi *as trainer* bisa memasukkan unsur keterampilan dalam menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi dalam materi *training*.

Saran/rekomendasi

Hasil pengujian hipotesis 4 yang ternyata ditolak dan bermakna sarana prasarana tidak berpengaruh atas keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, akan secara terperinci dibahas dari aspek saran atau rekomendasi kepada pihak yang terkait yaitu : regulator, pemerintahan Kota Depok dan Akademisi.

Regulator

Regulator memutuskan *software* yang dipakai dalam rangka sistem informasi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah sehingga mengurangi peperangan penawaran *software* sebagai sarana pendukung keberhasilan implementasi.

Pemerintahan Kota Bogor

Pemerintahan Kota Bogor menunggu keputusan dari pusat, sehingga membiarkan pusat yang memutuskan *software* yang dipakai dalam rangka sistem informasi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah sehingga mengurangi peperangan penawaran *software* sebagai sarana pendukung keberhasilan implementasi.

Akademisi

Perbaikan instrumen penelitian dengan menambah pertanyaan kuesioner

sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

Kontribusi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menekankan persepsi SDM akuntansi dan keuangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan SAP berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor. Kontribusi penelitian disini dibagi menjadi dua yaitu kontribusi lapangan/praktik dan kontribusi pengetahuan. Ada pun kontribusi untuk ilmu pengetahuan adalah untuk mengukur kesuksesan implementasi lebih dari sekadar persepsi, dan mungkin lebih tepat jika pengukuran kesuksesan dengan menggunakan indikator-indikator kesuksesan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kota Bogor yang berbasis akrual basis.Selanjutnya perlu diperbaiki pendekatan analisis tidak menggunakan linear berganda, tetapi menggunakan pendekatan non linear, yaitu Probit dan Logit, ada pun alasannya disini adalah variabel dependennya merupakan kategorik, sehingga lebih sesuai jika menggunakan pendekatan non linear dengan teknik analisis logit Probit (Gurajati, 2010).

PENUTUP

Simpulan

Secara bersama-sama Faktor Komitmen, Komunikasi dan Sarana Pendukung dan Sarana Pendukung mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual di Pemerintahan Kota Bogor. Etapi secara sendiri-sendiri, faktor SDM dan sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi lapora keuangan daerah berbasis akrual pada pemerintahan kota Bogor.

Faktor SDM konsisten dengan hasil Wahyuni (2014) dimana peneliti menemukan faktor SDM tidak berpengaruh atas tercapainya implementasi SAP basis akrual dan ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian Indriani (2013) dan Simanjuntak (2010). Ada pun persamaan responden dengan dengan SDM terkait akuntansi mulia dari verifikator bukti transaksi, enti jurnal dan penyusunan laporan keuangan SKPD, Dinas dan Badan.

Saran

Hasil Penelitian merekomendasikan Regulator dan Pemerintahan Kota Bogor untuk mendorong SKPD dan Badan serta Instansi terkait akuntansi dan keuangan pemerintahan kota Bogor mengutamakan faktor komunikasi diantara pihak yang berada pada tim akuntansi melalui kegiatan inovatif yang dilakukan pada sektor komersil, dimana mungkin sekat-sekat birokrasi lebih di lenturkan, sehingga mengurangi gap komunikasi.

Untuk faktor komitmen organisasi, perlu diteruskan kegiatan *capacity building* gyang bersifat berkelanjutan dan memiliki benamg merah dengan penilaian kerja individu mau pun penilaian kinerja unit kerja. Sehingga setiap kegitan yang menddorong motivasi dan komitmen kepada pemerintahan kota Bogor bisa langsung diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari mulai dari

verifikasi bukti transsaksi, input data transaski, dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada unit riset Program Vokasi UI dan staf yang telah memberikan hibah kepakaran untuk kepentingan penelitian terkait jurnal ini dan memfasilitasi dalam kepentingan administrasi atas kelancaran mulai dari proposal sampai dengan jurnal yang siap terbit.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fajar, Siti, Tri Heru (2013). *Manajemen SDM Sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaing*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Ardiansyah. (2013). *Factors Affecting The Effecting The Readdiness of PP 71 Tahun 2010 About Government Accounting Standard (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area*). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 1 (1):1-16.

Aryani, Arie. (2008). *Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI*. Tesis. Universitas Indonesia.

Asriani, Dinda. (2009). *Analisis Kesiapan Pegawai Menerima Perubahan Untuk Penerapan Balance Scorecard di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Tesis Universitas Indonesia.

Aritonang, Aldiani Sulani. (2009). *Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi S1 Universitas Sumatera Utara.

Azhar. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Budiarto. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)*. Tesis Pasca Sarjan. Universitas Mataram.

Damuharti, Desta. (2011*). Analisis Implementasi PP 24/2005 Menuju Kesiapan Implementasi PP 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Pada Pemerintah Provinsi NTB*. Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan. Universitas Mataram.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*, BP UNDIP. Semarang.

Gibson, James L, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, JR. (2003). *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara Publisher. Tangerang Selatan.

Indonesia. (2003).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*, Skripsi S1 Universitas Jember.

Mahmudi. (2003). *New Publik Management (NPM) Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen.* 6 (1). Pp. 69-76

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* ANDI. Yogyakarta

_____. (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.* Artikel 1 (4) Juni 2002. (Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat Krisis Moneter Indonesia. Jakarta, 7 Mei 2002).

Paulsson, Gert (2006). *Accrual Accounting in the Public Sector Experiencess from the Central Government in Sweden.* Financial Accountability and Management. Vo. 22(1), pp. 47-62

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Robbins, Stephen P. (2009). *Perilaku Organisasi.* Penerbit PT. Index Kelompok Gramedia. Jakarta.

Shafer, William E. (2002). *Ethical Pressure, Organizational-Professional Conflict, and Related Work Outcomes Among Management Accountants.* Jurnal of Business Ethics. 38. Pp.263-275

Simanjuntak, H. Binsar. (2010). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: http;//www.ksap.org. diakses tgl : 22-04-2014

Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfa Beta. Bandung.

Upping, Phetphrairin dan Judy Oliver. (2008). *Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries.* International Review of Business Research Paper. 7 (1) Januari 2011. Pp. 364-380

Wahyuni, Indra (2014). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah Provinsi NTB.* Tesis. Universitas Mataram,. NTB

Wardhaningrum, Oktaviani dan Putra (2014). *Implementasi Accrual Based-Budgeting pada Entitas Pemerintahan : Studi Literatur.* E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Vol 1(1), pp. 56-66

Warisno (2009). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.* Tesis. Universitas Sumatera Utara.